



# Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

# 13%



**Overall Similarity**

**Date:** Jan 28, 2025 (05:13 PM)

**Matches:** 274 / 2169 words

**Sources:** 17

**Remarks:** Moderate similarity detected, consider enhancing the document if necessary.

**Verify Report:**

Scan this QR Code



effectiveness of supervision in the management of the State Budget (APBN) in an effort to prevent budget irregularities in Indonesia. Effective supervision is an important step in minimizing acts of corruption that harm the state. With a qualitative descriptive method, this study describes how supervision can be carried out by the government in preventing irregularities in the state budget. The results show that transparent and accountable supervision can increase the efficiency of budget use and prevent irregularities. This research is expected to be an input for the government in formulating a more effective and efficient state budget management policy. Keywords: Accountability, Budget Deviation, Effectiveness, State Budget, Supervision, and Transparency

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengawasan dalam pengelolaan 2 Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam upaya mencegah penyimpangan

anggaran di Indonesia. Pengawasan yang efektif menjadi langkah penting dalam

meminimalisir tindakan korupsi yang merugikan negara. Dengan metode deskriptif

kualitatif, penelitian ini memaparkan bagaimana pengawasan yang dapat dilakukan oleh

pemerintah dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran negara. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengawasan yang transparan dan akuntabel 1 mampu

meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran

Efektivitas Pengawasan APBN dalam Mencegah Penyimpangan Anggaran 1620  
JCA - Vol. 1 No. 5 Februari 2025 serta mencegah terjadinya penyimpangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan APBN yang lebih efektif dan efisien. Kata kunci: Akuntabilitas, APBN, Efektivitas, Pengawasan, Penyimpangan Anggaran LATAR BELAKANG Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 7 Nomor 17 Tahun 2003, "APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR".

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan bernegara, meningkatkan pembangunan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, serta menjamin kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dalam melaksanakan APBN, pemerintah dapat dikatakan sebagai amanat rakyat, yang dimana pemerintah diharapkan dapat mengelola anggaran dengan baik (good governance) guna mendapatkan hasil yang maksimal dari program-program yang telah direncanakan dalam APBN, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat juga lebih nyata dan optimal. (Pandia et al., 2022)

Permasalahan terkait penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab merupakan permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Penyimpangan terhadap anggaran negara ini tidak hanya meraup total kerugian yang kecil, namun kerugian dalam skala yang sangat besar sehingga menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sudah banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabat publik yang rela melakukan tindakan kriminal berupa penyimpangan terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi. Contohnya dapat dilihat pada kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Pjs Kades Kurungan Nyawa III OKU Timur yang menjadi tersangka usai diduga melakukan korupsi terhadap dana desa yang berasal dari APBN, dengan total kerugian negara yang mencapai hingga Rp. 357 Juta. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada pembangunan desa yang dapat terhambat akibat korupsi yang dilakukan oleh mantan Pjs Kades tersebut. Permasalahan tersebut

hanyalah satu contoh kasus dari sekian banyaknya kasus-kasus penyimpangan terhadap APBN yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraup keuntungan yang besar bagi dirinya sendiri. Berkaitan dengan adanya permasalahan ini, pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan upaya dalam meminimalisir atau bahkan menghapus akar-akar timbulnya kesempatan korupsi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap APBN dengan lebih ketat dan intens untuk menghindari adanya kesempatan bagi oknum untuk melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara. Pengawasan bertujuan dalam menemukan kebenaran dan mengamalkannya. Hal ini tentu saja bukan untuk mencari kesalahan dari suatu perencanaan atau aktivitas yang sedang dilakukan, Pratiwi (Azifi & Marliyah, 2022). Pengawasan dapat dikatakan bermanfaat dalam memperbaiki atau mencegah kesalahan, ketidaksesuaian, penyimpangan, serta penyelewengan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab yang seharusnya, juga wewenang yang telah diamanatkan, Rossevelt et al (Azifi & Marliyah, 2022). Oleh karena itu, pentingnya pengawasan efektif yang dilakukan oleh pemerintah dapat menghindari serta mencegah terjadinya penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian besar bagi negara serta menghambat pembangunan infrastruktur. Berdasarkan pendahuluan tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji efektivitas pengawasan APBN dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan studi literatur terkait pentingnya efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir penyimpangan anggaran negara. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana efektivitas pengawasan APBN dalam mencegah penyimpangan anggaran. 13 Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan serta literatur akademik yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini

digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait kebijakan pengawasan yang dapat diterapkan oleh

Efektivitas Pengawasan APBN dalam Mencegah Penyimpangan Anggaran 1622  
JCA - Vol. 1 No. 5 Februari 2025 pemerintah dalam mencegah terjadinya kasus penyimpangan terhadap <sup>1</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan data dari laporan <sup>2</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, ditemukan bahwa kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp. 8,2 triliun. Kasus ini mencakup berbagai sektor, seperti pengadaan barang dan jasa, dana desa, dan belanja pegawai. Contoh nyata dari kasus ini adalah penyimpangan dana desa <sup>5</sup> di Kabupaten OKU Timur yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 357 juta (BPK, 2024). Permasalahan terkait penyimpangan anggaran negara ini tentunya harus segera diupayakan mengingat kerugian yang ditimbulkan sangat besar untuk negara. Hal ini tentunya menghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan tidak memadai. Oleh karena itu, perlulah peningkatan pengawasan yang lebih efektif terhadap APBN yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran negara. <sup>10</sup> Pengawasan merupakan proses pengamatan (monitoring) yang dilakukan terhadap suatu pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang direncanakan serta pengkoreksian terhadap beberapa pemikiran yang penting, Riawan (Santoso et al., 2023). Pada umumnya, pengawasan bukan ditujukan untuk mencari kesalahan, namun memberikan arahan terhadap pelaksanaan aktivitas agar <sup>10</sup> sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai pedoman terhadap pengelolaan serta pengeluaran yang digunakan dapat tepat sasaran. Hal ini sebagai bentuk dalam mendukung kemajuan serta perkembangan negara dan daerah. Dengan sifatnya yang lebih “mencegah”, pengawasan dapat menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran negara dan daerah. Jika masih terdapat adanya penyimpangan, <sup>2</sup>

maka dapat segera ditemukan melalui pengawasan yang efektif. (Santoso et al., 2023)

Pengawasan sangat penting untuk dilakukan dalam pengelolaan Anggaran. 1

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan terhadap anggaran yang telah dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, namun dimanfaatkan dan disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

Menurut Aziza, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan anggaran negara, perlunya pengawasan yang tepat bagi pemerintah dalam pengelolaannya. (Rahamaningsih, 2023) Hal ini tentu saja agar hasil pengelolaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memicu pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas serta 1  
transparansi dalam pengelolaan anggaran sebagai upaya pengawasan yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan APBN. Menurut Kristian et al., mengemukakan bahwa akuntabilitas dapat dikatakan sebagai tanggung jawab individu, badan hukum, atau pimpinan organisasi dalam menawarkan informasi atau memberikan penjelasan terkait tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam mencari informasi atau yang berkaitan dengan akuntabilitas tersebut. (Fitria et al., 2024) Akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai tugas dari seorang yang sudah diamanatkan (agen) untuk memberikan akun, laporan, presentasi, serta pengungkapan secara terperinci dari semua aktivitas dan tanggung jawab yang telah mereka lakukan kepada wali amanat (prinsipal) yang dimana mereka memiliki kekuatan serta kewenangan yang sah dalam menuntut akuntabilitas tersebut, Alvionita (Fitria et al., 2024). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban terkait integritas keuangan, mengungkapkan serta menaati atas peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadikan sasaran mengenai pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan yang dimana penyampaian terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, yang terdiri dari penerimaan, penyimpanan serta pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga

tertentu, Rina (Azizah & Andayani, 2022). Dengan adanya penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan dan pengawasan anggaran negara, maka dapat disimpulkan bahwa tingginya akuntabilitas terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan anggaran tersebut demi kepentingan pribadinya. Hal ini dikarenakan adanya laporan yang senantiasa dilakukan untuk memperlihatkan segala hasil laporan yang telah mereka lakukan apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Jika terdapat kekeliruan atau adanya ketidaksesuaian didalam laporan tersebut, maka pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi terhadap pelaku penyimpangan anggaran negara.

Efektivitas Pengawasan APBN dalam Mencegah Penyimpangan Anggaran 1624  
JCA - Vol. 1 No. 5 Februari 2025 Selain itu, dalam meningkatkan keefektifan pengawasan terhadap APBN, pemerintah juga dapat menerapkan sistem transparansi guna mendapatkan kepercayaan masyarakat <sup>8</sup> bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan dan dikelola untuk pembangunan infrastruktur guna sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan <sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengungkapkan bahwa transparan merupakan transparansi yang meliputi penyediaan informasi keuangan yang lebih terbuka dan jujur kepada masyarakat. (Syarifuddin et al., 2024) Transparansi dapat diartikan sebagai kebukaan, yang mana hal ini berarti membuka diri kepada masyarakat guna memberikan apa yang menjadi hak mereka untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta, adil, serta tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan organisasi, yang memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, serta rahasia negara, Rina (Azzahra, 2024). Menurut Rano mengungkapkan bahwa transparansi ialah nilai fundamental yang menjamin akses bagi setiap orang terhadap informasi yang berkaitan dengan administrasi pemerintah, yang mana hal ini termasuk kebijakan, pelaksanaan dan pembuatannya, sekaligus hasil yang diperoleh. (Fitria et al., 2024) Transparansi juga

dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyediakan akses terbuka bagi semua kalangan untuk mengakses informasi keuangan serta kebijakan. Dalam melakukan pengelolaan anggaran negara, maka transparansi harus diterapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan transparansi sifatnya wajib, yang mana dapat membantu sekaligus meningkatkan keefektifan pada <sup>8</sup> pengawasan anggaran negara untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap APBN. Selain itu, dengan diterapkannya sistem transparansi, maka juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbukaan pemerintah terhadap informasi terkait anggaran negara yang dapat dengan <sup>1</sup> mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga dengan hal ini pemerintah juga dapat merasa terbantu dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran. Hal tersebut juga memungkinkan minimnya terjadi tindakan penyimpangan anggaran yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang hanya ingin memanfaatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Sehingga <sup>8</sup> anggaran yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat terjamin pengelolaannya.

**KESIMPULAN** Meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki <sup>2</sup> pengelolaan keuangan negara melalui penerapan teknologi pengawasan, seperti e-budgeting dan e-audit, masih banyak temuan penyimpangan yang merugikan negara. Penyimpangan tersebut terjadi di berbagai sektor, termasuk dana desa, pengadaan barang dan jasa, serta belanja pegawai. Kasus korupsi yang menonjol, seperti pada dana desa di Lampung Timur dan pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, menunjukkan lemahnya pengawasan internal <sup>8</sup> dan potensi penyalahgunaan anggaran. Meskipun teknologi pengawasan telah memberikan dampak positif di beberapa daerah, seperti mengurangi penyimpangan di Jawa Barat, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, terutama di daerah terpencil. <sup>17</sup> Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan pemanfaatan teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini hanya menjelaskan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap APBN, yaitu akuntabilitas dan



transparansi untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran negara. Oleh karena itu, perlunya perluasan materi terkait kebijakan pengawasan yang lebih efektif untuk menghindari penyimpangan terhadap anggaran negara. DAFTAR PUSTAKA Azifi, M. R., & Marliyah. (2022). PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP **1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA MEDAN**. JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi, 1(5). <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.250> Azizah, W., & Andayani. (2022). **14 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa**. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 11(10). Azzahra, N. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, **12 dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di** Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Revolusioner, 7(11). **2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta: BPK RI. Fitria, E., Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2024). Analisis Penerapan Prinsip

Efektivitas Pengawasan APBN dalam Mencegah Penyimpangan Anggaran 1626 JCA - Vol. 1 No. 5 Februari 2025 **7 Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang)**. Journal Of Economic, Business, and Accounting (COSTING), 7(4). Pandia, K. V., **4 Sutrasna, Y., & Navalino, D. A.** (2022). Pengaruh Apbn, Produk Domestik Bruto Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Anggaran Pertahanan T.a 2010-2020. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(8). Rahamaningsih, A. A. **9** (2023). Akuntabilitas APBN Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Jatijajar Law Review, 2(1). Santoso, J., Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). **2 PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN DAERAH**. Pagaruyuang Law Journal, 7(1). <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4562> Sumsel.bpk.go.id. (2024, 1 Maret). **5 Diduga Korupsi Dana Desa Rp 357 Juta, Mantan Pjs Kades Kurungan Nyawa III OKU**

Timur Jadi Tersangka. Diakses pada 10 Januari 2025, dari

<https://sumsel.bpk.go.id/2024/03/01/diduga-korupsi-dana- desa-rp-357juta-mantan- pjs->

kades-kurungan-nyawa-iii-oku-timur-jadi tersangka/ Syarifuddin, S., Asidik, K. E., &

Wuriasih, A. E. (2024). 3 Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sidumulyo, Distrik

Oransbari). Jurnal Lensa Ekonomi, 18(2).

## Sources

1	<a href="https://kampusedu.id/opini/peran-masyarakat-dalam-pengawasan-pelaksanaan-anggaran-negara/">https://kampusedu.id/opini/peran-masyarakat-dalam-pengawasan-pelaksanaan-anggaran-negara/</a> INTERNET 2%
2	<a href="https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4562">https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4562</a> INTERNET 2%
3	<a href="https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/lensa/article/view/378">https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/lensa/article/view/378</a> INTERNET 1%
4	<a href="https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/1166">https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/1166</a> INTERNET 1%
5	<a href="https://sumsel.bpk.go.id/2024/03/01/diduga-korupsi-dana-desa-rp-357-juta-mantan-pjs-kades-kurungan-nyawa-iii-oku-timur-jadi-tersangka/">https://sumsel.bpk.go.id/2024/03/01/diduga-korupsi-dana-desa-rp-357-juta-mantan-pjs-kades-kurungan-nyawa-iii-oku-timur-jadi-tersangka/</a> INTERNET 1%
6	<a href="https://ojs.umrah.ac.id/">https://ojs.umrah.ac.id/</a> INTERNET 1%
7	<a href="https://jurnal.irs.ac.id/index.php/ak/article/view/259/159">https://jurnal.irs.ac.id/index.php/ak/article/view/259/159</a> INTERNET 1%
8	<a href="https://kampusedu.id/opini/meningkatkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-anggaran-negara-untuk-transparansi-dan-akuntabilitas/">https://kampusedu.id/opini/meningkatkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-anggaran-negara-untuk-transparansi-dan-akuntabilitas/</a> INTERNET 1%
9	<a href="https://scholar.google.com/citations?user=BrRXv0cAAAAJ">https://scholar.google.com/citations?user=BrRXv0cAAAAJ</a> INTERNET 1%
10	<a href="http://digilib.unila.ac.id/10875/3/BAB%20II.pdf">http://digilib.unila.ac.id/10875/3/BAB II.pdf</a> INTERNET <1%
11	<a href="https://idalamat.com/alamat/361067/rektorat-universitas-maritim-raja-ali-haji-umrah-tanjung-pinang-kepulauan-riau">https://idalamat.com/alamat/361067/rektorat-universitas-maritim-raja-ali-haji-umrah-tanjung-pinang-kepulauan-riau</a> INTERNET <1%
12	<a href="https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&amp;id=13639">https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&amp;id=13639</a> INTERNET <1%
13	<a href="http://repository.upi.edu/60782/5/S_JKR_1706171_Chapter3.pdf">http://repository.upi.edu/60782/5/S_JKR_1706171_Chapter3.pdf</a> INTERNET <1%
14	<a href="https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/33246">https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/33246</a> INTERNET <1%

- 15 <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/419069/download/Jurnal-Haliza-Nur-Rila--64200750.pdf>  
INTERNET  
<1%
- 
- 16 [https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8337/11/BAB III.pdf](https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8337/11/BAB_III.pdf)  
INTERNET  
<1%
- 
- 17 [https://www.researchgate.net/publication/357352899\\_Pemanfaatan\\_Teknologi\\_Kesehatan\\_dalam\\_Pengawasan\\_Program\\_Kesehatan\\_Ibu\\_dan\\_Anak\\_KIA\\_di\\_Indonesia\\_Kajian\\_Literatur](https://www.researchgate.net/publication/357352899_Pemanfaatan_Teknologi_Kesehatan_dalam_Pengawasan_Program_Kesehatan_Ibu_dan_Anak_KIA_di_Indonesia_Kajian_Literatur)  
INTERNET  
<1%
- 

EXCLUDE CUSTOM MATCHES      ON

EXCLUDE QUOTES                OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY        OFF